

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Penelitian ini berfokus pada fenomena munculnya kelompok relawan yaitu Teman Ahok yang mendukung Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta pada Pemilihan Gubernur tahun 2017. Penelitian ini membahas proses terbentuknya Teman Ahok dengan menggunakan teori *new social movement*. Fokus dalam penelitian ini adalah proses, atau tahapan-tahapan yang dijalani Teman Ahok dari yang hanya berupa perkumpulan orang-orang yang menginginkan Ahok maju dalam Pilgub 2017, lalu maju ke tahap terbentuknya sebuah organisasi yang lebih formal hingga akhirnya mengalami *decline* (penurunan). Melalui proses ini, dapat dijelaskan bagaimana kelompok relawan menjadi media alternatif masyarakat sebagai wadah dalam berpartisipasi dan beraspirasi dalam konteks pilkada, salah satunya sebagai tempat untuk menampung dukungan masyarakat terhadap satu kandidat tertentu. Konsep Volunterisme disini hanya digunakan untuk menganalisis motif relawan untuk membentuk dan bergabung dalam Teman Ahok. Dalam tahapan *decline* akan dianalisis peran volunteer dalam tahapan tersebut.

Fenomena ini dipilih karena volunterisme dan gerakan sosial relatif baru dalam pencalonan di Pilkada. Karena dalam hal ini, Teman Ahok tidak hanya sebatas mendukung Ahok dalam Pilgub 2017 tetapi juga memfasilitasi Ahok dalam pencalonan tersebut. Teman Ahok dipilih sebagai objek penelitian karena peneliti tertarik dengan sepaik terjang Teman Ahok dalam keberhasilannya menggalang dukungan dari masyarakat pada program mereka yaitu pengumpulan satu juta KTP masyarakat Jakarta ketika Ahok mencoba mencalonkan diri dengan jalur independen bersama Heru, dan berhasil mendapatkan perhatian yang cukup besar dari masyarakat DKI Jakarta. Kedua, karena *volunteer* dalam Teman Ahok berasal dari beragam profesi seperti, pedagang kecil, tukang ojek, pemilik panti asuhan, hingga pengusaha. Ketiga, kelompok relawan ini tidak hanya berfungsi untuk mendukung Ahok menjadi Gubernur pada Pilgub 2017 tetapi juga membantu mensosialisasikan kebijakan yang dibuat Ahok saat masih menjabat menjadi Gubernur pada periode sebelumnya.

Kelompok relawan yang muncul dalam pemilu dapat dikatakan sebagai penggerak, karena meskipun dalam sebuah pemilihan pemimpin baik itu presiden ataupun pemilihan kepala daerah, pemilihan tersebut selalu identik dengan partai politik yang terlibat. Namun, munculnya kelompok relawan baik dalam pemilu ataupun pilkada menunjukkan saat ini, kelompok relawan mampu menjadi penggerak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilihan tersebut. Dalam Gerakan Sosial Baru, tidak berlandaskan dengan satu ideologi tertentu, struktur kelompok cenderung non-institusional, partisipannya lintas kelas, dan taktik yang digunakan adalah memobilisasi untuk kelangsungan hidup (Isfandiarly, 2013: 4).

Hal-hal tersebut memiliki kesamaan dengan tindakan-tindakan yang dilakukan para kelompok relawan dalam pemilu. Kelompok relawan cenderung tidak memiliki struktur yang formal, dan berangkat dari berbagai isu, dan biasanya berangkat dari permasalahan yang terjadi sehari-hari tidak hanya karena satu ideologi tertentu. Para anggota memiliki latar belakang pekerjaan yang berbeda-beda yang menunjukkan kelompok relawan memiliki anggota lintas kelas. Menurut Nick Crossley (dalam Sukmana O. , 2016: 11-15) mengatakan jika studi gerakan sosial di Amerika Serikat sebelum tahun 1970-an dipengaruhi oleh pemikiran perspektif perilaku kolektif. Sebuah gerakan lahir atas adanya keluhan-keluhan, kekurangan, ketidakpastian, ketegangan struktural atau dari bentuk penderitaan lainnya. Menurut Nick Crossley pula, sedangkan di Eropa pada era sebelum tahun 1970 tradisi Marxist mewarnai munculnya gerakan sosial yang menyatakan jika gerakan sosial mulai dari konflik dan kontradiksi di masyarakat.

Gerakan sosial baru dapat dikatakan berawal dari reaksi masyarakat terhadap isu-isu yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, dan beranggotakan masyarakat yang berasal dari berbagai kelas dan dipersatukan oleh satu tujuan bersama. Isu yang diangkat dalam Gerakan Sosial Baru tidak hanya sebatas pertentangan kelas atau seputar permasalahan ekonomi saja melainkan lebih luas seperti feminisme, isu lingkungan, perdamaian, perang, dan lain-lain. Di Indonesia, Gerakan Sosial sudah lahir sebelum proklamasi kemerdekaan terjadi. Sejak era kolonial Belanda, gerakan sosial sudah mulai bermunculan melalui pemberontakan petani dan gerakan-gerakan nasionalisme yang terjadi pada awal abad ke-20 (Suharko, 2006: 2). Pada Orde Baru,

gerakan-gerakan yang muncul berkembang menjadi gerakan demokrasi, feminisme, hak-hak asasi manusia, dan gerakan lingkungan. Gerakan-gerakan tersebut semakin berkembang dan beragam serta menguat seiring dengan tersedianya ruang gerak politik yang semakin luas (Suharko, 2006: 2).

Dalam perspektif ilmu politik, Gerakan Sosial dan kelompok kepentingan (*interest group*) merupakan dua hal yang sulit untuk dibedakan. Kelompok kepentingan merupakan suatu asosiasi yang dibuat dengan tujuan mempengaruhi para aktor pembuat kebijakan dalam proses pembuatan kebijakan agar kebijakan yang dihasilkan dapat menguntungkan anggota dari asosiasi tersebut. Ketidakjelasan perbedaan tersebut dijelaskan pula oleh Jary & Jary dalam Suharko (2006:5):

“Tidak ada batasan yang tegas antara kelompok kepentingan dengan gerakan sosial. tidak seperti organisasi formal, seperti partai politik atau kelompok-kelompok kepentingan atau penekan yang lebih terorganisasi, gerakan sosial mungkin hanya diorganisasi secara informal, meski ia memiliki kaitan dengan partai politik dan juga kelompok-kelompok yang terlembagakan, dan bahkan suatu gerakan sosial bisa mengarah ke pembentukan partai politik” .

Menurut Ondrej Cisar (2013: 1-2), terdapat dua cara untuk membingkai hubungan antara kelompok kepentingan dengan gerakan sosial secara konseptual. Perspektif pertama teori *collective behavior*, yang mengkonseptualisasikan kelompok kepentingan sebagai aktor-aktor yang telah terkolektif, terinstitusialisasi dan terformalisasi dalam proses pembuatan kebijakan. Menurut Ondrej Cisar, terhubung dengan para aktor pembuat kebijakan untuk mempengaruhi hasil dari proses pembuatan kebijakan tersebut agar sesuai dengan keinginan kelompok kepentingan tersebut. Mereka menggunakan strategi yang konvensional seperti dengan *lobbying*,

sedangkan gerakan sosial, kurang terinstitusialisasi, bergantung pada mobilisasi kolektif dan protes daripada aksi yang bersifat konvensional. Perbedaan antara kelompok kepentingan dengan gerakan sosial dalam perspektif ini adalah adanya perbedaan dalam kolektivitasnya. Menurut Ondrej Cisar, dalam perspektif kedua, yaitu teori *classical pluralist* dan teori mobilisasi sumber daya yang menyebutkan jika *Social Movement Organization* dan kelompok kepentingan sulit dijelaskan perbedaannya karena tidak ada teori yang dapat dengan tegas menjelaskan perbedaan kedua hal tersebut. Dalam perspektif ini perbedaannya keduanya bersifat nominal yang mana hanya sekedar berdasarkan ilmu yang digunakan. Jika dalam sosiologi menyebut mereka sebagai *Social Movement Organization (SMO)*, sedangkan orang politik menyebutnya sebagai kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan hanya melengkapi beberapa bagian dari SMO. Tidak seperti kelompok kepentingan, terdapat gerakan sosial yang radikal. SMO tidak berjuang dengan proses politik yang konvensional. Daripada mengadvokasi kepentingan tertentu, SMO lahir dari sebuah kritik terhadap pemerintah dan lebih menyukai hal yang alternatif.

Berdasarkan pendapat dari Ondrej Cisar mengenai organisasi gerakan sosial dengan kelompok kepentingan, perbedaan keduanya sulit untuk dibedakan. Namun hal yang paling mudah untuk membedakan keduanya adalah cara yang dipakai organisasi gerakan sosial maupun kelompok kepentingan dalam mencapai tujuan mereka. Aktor-aktor kelompok kepentingan biasanya lebih terformalisasi dalam proses pembuatan kebijakan, karena kelompok kepentingan biasanya mempengaruhi suatu proses pembuatan kebijakan agar kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan

keinginan kelompok kepentingan tersebut sehingga cara yang digunakan pun lebih konvensional seperti dengan *lobbying*. Organisasi gerakan sosial lebih luas lagi, karena tidak hanya fokus pada satu isu saja, bahkan kebanyakan lahir dari adanya kritik atau ketidakpuasan dalam pemerintah dan cara yang digunakan untuk mencapai tujuannya lebih variatif sehingga banyak gerakan sosial yang akhirnya berujung pada aksi yang radikal.

Di dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi, keterlibatan masyarakat pada pemilihan umum merupakan hal yang penting. Namun, di Indonesia yang juga termasuk negara demokrasi partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum masih minim. Hal tersebut berdasarkan data dari KPU, angka partisipasi pemilih dalam pemilu calon legislatif pada tahun 2004 berjumlah 84%, sedangkan pada pemilu tahun 2009 jumlahnya menurun menjadi 71% (Maulana, 2014). Pada pemilu 2014 presentasi partisipasi pemilih berjumlah 72% yang tidak jauh berbeda dengan tingkat partisipasi pada pemilu 2009 (Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2014). Salah satu faktornya adalah ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai politik yang semakin meningkat. Bersumber dari survei yang dilakukan oleh *Political Communication Institute*, Publik yang tidak percaya parpol pada tahun 2014 yaitu sebesar 58,2 persen. Kemudian yang menyatakan percaya 26,3 persen, dan menyatakan tidak tahu sebesar 15,5 persen (Firdaus, 2015). Tingkat kepercayaan publik ini dipengaruhi oleh krisis yang dialami sejumlah partai politik. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat juga dikarenakan beberapa faktor, seperti banyaknya parpol yang terjerat kasus korupsi, banyaknya konflik

internal yang muncul di publik, dan pelanggaran etika yang dilakukan parpol (Maharani, 2014). Oleh karena itu, munculah kelompok-kelompok relawan yang dibuat oleh masyarakat sipil baik untuk menjaga agar pemilu berjalan dengan baik ataupun untuk mendukung salah satu kandidat yang mereka jagokan.

Kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan bersifat sukarela, yang mana dikenal dengan fenomena voluntarisme. Fenomena ini sebenarnya bukanlah hal baru, semangat ini telah lama ada dalam tradisi dan dilakukan oleh masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Nina Eliasoph (dalam Bambang, 2014: 150) mengatakan jika kebangkitan voluntarisme di Indonesia menandai kembalinya partisipasi publik. Selain itu, kelompok-kelompok relawan tersebut melihat kapasitas atau program-program yang dibuat oleh kandidat bukan berdasarkan faktor partai apa yang mendukung kandidat tersebut. Mereka cenderung lebih kritis dan rasional dalam memilih. Saat ini masyarakat cenderung enggan untuk mengikatkan diri dengan suatu partai tertentu. Karena yang mereka lihat adalah kontestan individual atau kinerja partai bukan lagi hanya sebatas ideologi yang digunakan. *Volunteering* dalam penelitian ini merujuk pada sebuah keinginan kolektif untuk membuat perubahan yang sistematis dengan menggunakan prosedur yang sudah ada, tetapi dengan kesadaran jika perubahan tidak dapat terjadi hanya dengan aktor atau institusi yang dominan dalam hal ini partai politik dalam pilkada DKI Jakarta, sehingga para relawan membentuk dan tergabung dalam sebuah kelompok atau organisasi kerelawanan untuk mencapai tujuan mereka. Menurut Ahmad Suaedy (2014: 112-114) menyatakan jika relawan mengorganisasi diri mereka sendiri secara spontanitas

dan mempengaruhi masyarakat untuk memilih kandidat yang terbaik, tanpa memilihat partai yang mengafiliasi kandidat tersebut. Menurut Ahmad Suaedy, relawan bertemu dan membuat hubungan secara langsung maupun tidak langsung terhadap petugas resmi yang bertugas memonitor *polling*, dengan pendukung yang secara independen memonitor pemilihan, dengan individu yang secara langsung direkrut untuk menangani isu tertentu, baik di tim kampanye atau pemerintahan ketika pemilihan telah berakhir.

Pemilihan gubernur DKI Jakarta yang diadakan pada tahun 2017, menjadi sorotan masyarakat khususnya masyarakat DKI Jakarta karena pemilihan ini akan menentukan sosok pemimpin yang akan terpilih untuk memimpin Jakarta satu periode ke depan. Walaupun pemilihan Gubernur DKI Jakarta masih diadakan pada bulan Februari 2017 mendatang, tetapi sepertinya *euphoria* masyarakat mengenai hal tersebut sudah terlihat. Massa yang terkoordinir maupun tidak terkoordinir sudah mulai menunjukkan dukungannya terhadap kandidat jagoannya masing-masing. Fenomena tersebut menunjukkan adanya animo yang baik dalam diri masyarakat terkait pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta (Wardana, 2016). Media massa yang progresif dan dinamis dalam memberitakan dinamika politik menjelang Pilgub 2017, dan juga media sosial yang dijadikan sebagai alat untuk publikasi calon dan perkenalan calon kandidat menjadikan masyarakat mau tidak mau akan tersentuh isu Pilgub tersebut.

Isu mengenai Pilgub 2017 semakin menarik dengan munculnya para kelompok relawan yang mendukung jagoannya masing-masing. Hal tersebut terlihat

dengan adanya Sahabat Djarot, Teman Kita Semua, Suka Haji Lulung, Teman Ahok, Agus Fans Club, dan lain-lain. Munculnya kelompok-kelompok relawan tersebut menambah dinamisnya suasana politik menjelang Pilgub DKI. Sebenarnya, maraknya kelompok relawan yang muncul untuk mendukung kandidat tertentu dalam pemilu bukanlah hal yang baru. Contohnya ketika Pilkada DKI Jakarta tahun 2012 silam, muncul kelompok relawan yang mendukung Jokowi-Ahok hingga akhirnya mereka sukses memenangkan Pilkada, dan pada Pemilihan Presiden 2014 silam, terdapat beberapa kelompok relawan yang lahir untuk mendukung Jokowi-JK hingga akhirnya mereka memenangkan pemilihan tersebut. Hal ini diharapkan mampu memunculkan kembali kekuatan sosial non-partai yang selama ini didominasi partai politik (Bambang, 2014: 148)

Teman Ahok adalah satu kelompok relawan politik yang ikut meramaikan suasana menjelang pemilihan gubernur tersebut. Kelompok relawan yang secara legal terdaftar pada 16 Juni 2015 ini, merupakan sebuah perkumpulan relawan yang didirikan oleh sekelompok anak muda yang bertujuan untuk membantu dan menemani Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) dalam mewujudkan Jakarta Baru yang lebih bersih, maju, dan manusiawi. Awal mula terbentuknya Teman Ahok berawal dari adanya aksi Lawan Begal APBD yang terjadi pada tanggal 1 Maret 2015 untuk mendukung Ahok memerangi pembegalan di APBD terkait dengan persetujuan yang terjadi antara Ahok dengan DPRD DKI Jakarta (Belarminus, 2015). Aksi gerakan simpati tersebut mempertemukan kelima para pendiri Teman Ahok yang terdiri dari lima pemuda yaitu Amalia Yuningtyas,

Singgih Widyastono, Aditya Yogi Prabowo, Richard Saerang, dan Muhammad Fathoni. Kelima pemuda tersebut akhirnya membuat sebuah perkumpulan yang bernama Teman Ahok untuk menemani Ahok dalam meneruskan tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Teman Ahok telah terdaftar dengan legalitas akta notaris dan terdaftar secara resmi di Menkumham pada 16 Juni 2015 (Riana, 2016). Orang-orang yang terlibat dalam gerakan simpatik tersebut sebagian berasal dari kelompok Jakarta Baru, yang mana kelompok tersebut merupakan kelompok relawan pendukung Jokowi-Ahok pada Pilgub Jakarta 2012, dan sebagian lagi berasal dari masyarakat yang merasa puas dengan kinerja Ahok dan menginginkan Ahok mencalonkan diri pada Pilgub DKI Jakarta periode 2017-2022.

Perbedaan Teman Ahok dengan kelompok relawan lain adalah kelompok relawan ini sudah terbentuk sebelum Ahok mencalonkan diri menjadi calon Gubernur pada Pilkada 2017, yang mana biasanya kelompok relawan lain baru terbentuk setelah pencalonan telah resmi dilakukan. Karena mengusung Ahok menjadi calon gubernur DKI Jakarta menggunakan jalur independen maka Teman Ahok membantu mengumpulkan KTP agar Ahok bisa mencalonkan diri, sehingga sebelum pencalonan gubernur resmi dibuka Teman Ahok sudah terbentuk dan memulai kegiatan mereka mengumpulkan KTP. Selain fokus dalam memenangkan Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta, Teman Ahok juga fokus pada kebijakan-kebijakan yang dibuat Ahok. Seperti membantu mensosialisasikan kebijakan-kebijakan yang dibuat Ahok pada masyarakat via *website* resmi mereka (Teman Ahok, 2017). Berdasarkan informasi yang di dapat dari website resmi Teman Ahok, dukungan Teman Ahok terhadap

pencalonan Ahok sebagai Calon Gubernur di Pilgub 2017 adalah dengan bergerak secara terorganisir untuk memastikan Ahok memenuhi syarat dalam pemilihan kepala daerah 2017. Pada awal pencalonan Ahok pada Pilgub 2017, Teman Ahok mendukung Basuki Tjahaya Purnama (ahok) untuk menjadi calon Gubernur DKI Jakarta dengan jalur Independen hal tersebut sebagai salah satu dukungan terhadap Ahok agar terus konsisten terhadap kinerjanya dan hanya akan merasa berhutang pada rakyat bukan pada partai politik. Selain itu juga, Teman Ahok membuat suatu gerakan yang mana akan mengawal seluruh kebijakan Ahok agar tidak disalahpahami oleh masyarakat akibat biasanya pemberitaan menjelang pemilihan (Teman Ahok, 2017).

Jika dianalisis dengan perspektif Gerakan Sosial, Teman Ahok termasuk kedalam Gerakan Sosial Baru. Hal tersebut merujuk dari pendapat Pichardo dan Singh dalam (Purboningsih, 2015 :105-106) yang merumuskan Gerakan Sosial Baru dengan : Ideologi dan tujuan, taktik dan pengorganisasian, partisipan atau aktor, partisipasi publik. Dari kelima hal tersebut, terdapat tiga hal yang paling menunjukkan jika Teman Ahok merupakan Gerakan Sosial Baru. Tujuan dan ideologi dalam dibentuknya Teman Ahok tidak hanya sebatas pertentangan kelas seperti antikapitalisme atau revolusi kelas. Tetapi lebih luas lagi, yaitu bergerak untuk mendukung salah satu kandidat dalam pilkada. Partisipan atau aktor, Teman Ahok didirikan oleh sekelompok pemuda dan relawan yang bergabung terdiri dari berbagai macam profesi hal tersebut sama halnya dengan konsep Gerakan Sosial Baru yang partisipannya tidak terkotak oleh kelas tertentu. Teman Ahok membutuhkan

partisipasi publik sama halnya dengan konsep Gerakan Sosial Baru yang di dalamnya terdapat partisipasi publik. Teman Ahok merupakan sebuah gerakan sosial yang berbasis volunterisme bukan dari sebuah perlawanan. Selain itu, perbedaan Gerakan Sosial dan kelompok kepentingan memang sangat sulit untuk dibedakan. Tetapi dalam hal ini Teman Ahok lebih cenderung kepada Gerakan Sosial daripada kelompok kepentingan. Hal tersebut terkait dengan tujuan dibentuknya Teman Ahok yang tidak dibuat untuk mempengaruhi aktor pembuat kebijakan agar hasil dari proses pembuatan kebijakan sesuai dengan kepentingan mereka. Tetapi lebih kepada suatu tindakan kolektif yang ingin mempengaruhi publik untuk memilih kandidat pilihan mereka. Selain itu, cara yang dilakukan bukan berupa *lobbying* seperti kelompok kepentingan tetapi lebih kepada aksi langsung seperti pengumpulan KTP, kampanye via media sosial, dan lain-lain.

Dalam perspektif ilmu politik, kelompok relawan dalam suatu pemilihan umum mampu meningkatkan penggalangan kekuatan politik bagi calon kandidat dalam pemilu. Kelompok relawan menjadi aspek yang penting untuk masyarakat dalam mewujudkan demokrasi yang lebih partisipatoris lagi. Karena seperti yang telah di jelaskan sebelumnya, partisipasi masyarakat Indonesia dalam pemilu masih sangat minim yang salah satunya disebabkan oleh *distrust* terhadap partai politik. Sehingga kelompok relawan menjadi media alternatif dalam mewedahi aspirasi masyarakat dalam berpolitik. Selain itu, mewujudkan partisipasi masyarakat tanpa adanya sekat agama, etnis, ras ataupun kelas (Bambang, 2014). Sehingga tidak dapat

dipungkiri jika fenomena kelompok relawan, menandakan kembalinya partisipasi publik dalam proses politik.

Untuk memahami gambaran konsep serupa yang pernah terjadi, peneliti mengkaji beberapa penelitian terdahulu. Hal tersebut untuk menguatkan argumen yang membantu penggambaran konsep yang ingin dijelaskan. Penelitian terdahulu pertama adalah tulisan dari Agusdin Pulungan dengan judul Partisipasi Kelompok Masyarakat dalam Kampanye Pemilu Presiden (Studi kasus Kelompok Relawan Pendukung Pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden Amien Rais-Siswono pada Pemilu Presiden tahun 2004 di Kecamatan Pamulang) tulisan oleh Agusdin mendeskripsikan bagaimana masyarakat melakukan kampanye untuk mendukung calon presiden dan wakil presiden Amien Rais-Siswono Yudo Husodo dalam pemilu presiden. Penelitian oleh Agusdin menggunakan sudut pandang teori gerakan sosial, teori mobilisasi sumberdaya. Hasil dari penelitian yang dilakukan Agusdin adalah ditemukan jika bentuk-bentuk kegiatan politik kelompok relawan politik bersifat sporadis karena proses pembentukan kelompok terjadi saat pemilu saja. Selain itu, individu masyarakat yang tergabung dalam kelompok relawan bukan berasal dari kelompok masyarakat politik. Alasan mengikuti kelompok relawan bukan berasal dari ideologis, tetapi isu-isu sosial ekonomi dan isu figuritas tokoh politik yang didukung.

Dalam penelitian Agusdin, terdapat keterkaitan dengan penelitian yang peneliti kaji. Baik penelitian ini maupun penelitian yang peneliti kaji membahas mengenai kelompok relawan yang mendukung salah satu kandidat dalam sebuah

pemilihan umum. Persamaan lainnya adalah salah satu teori yang digunakan menggunakan teori gerakan sosial. Terakhir pada salah satu pembahasannya, mengkaji mengenai proses terbentuknya kelompok relawan tersebut. Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang peneliti kaji adalah perbedaan objek penelitian. Penelitian Agusdin mengkaji Kelompok Relawan Pendukung Pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden Amin Rais-Siswono sedangkan penelitian yang peneliti kaji adalah Teman Ahok. Teori yang digunakan juga memiliki perbedaan, penelitian Agusdin menggunakan teori Gerakan Sosial dan Mobilisasi Sumber Daya sedangkan pada penelitian yang peneliti kaji menggunakan teori Gerakan Sosial Baru. Walaupun terdapat persamaan karena fokus pada proses terbentuknya kelompok relawan dalam pemilihan pemimpin, tetapi penelitian Agusdin lebih fokus kepada bentuk dan sifat kelompok relawan, latar belakang partisan dalam kelompok relawan tersebut dan alasan partisan bergabung. Sedangkan dalam penelitian yang peneliti kaji, membahas mengenai proses terbentuknya kelompok relawan dengan melihat tahapan-tahapan yang dilalui kelompok relawan tersebut menggunakan konsep gerakan sosial baru.

Penelitian terdahulu kedua adalah penelitian yang ditulis oleh Sayekti Dwi Purboningsih dengan judul Gerakan Sosial Baru Perspektif Kritis: Relawan Politik Dalam Pilpres 2014 di Surabaya. Penelitian yang dilakukan oleh Sayekti berusaha menjawab pertanyaan mengenai proses terbentuknya kelompok relawan sebagai sebuah gerakan sosial baru dan mendeskripsikan proses terbentuknya kelompok relawan serta analisis dalam perspektif kritis. Metode yang digunakan dalam

penelitian oleh Sayekti adalah deskriptif kualitatif berbasis studi kasus. Hasil dari penelitian yang dilakukan Sayekti adalah menunjukkan jika kelompok relawan dilatarbelakangi oleh kegelisahan dan kekecewaan terhadap kebijakan atau pemerintah terdahulu. Relawan politik bertujuan untuk mendukung calon presiden Joko Widodo. Berdasarkan perspektif kritis, faktor tindakan individual maupun kelompok melakukan kegiatan sukarela dengan menggunakan kesadaran rasional. Mereka menilai dari *track record* dan program-program yang diusung Joko Widodo. Dalam penelitian yang dilakukan Sayekti, terdapat keterkaitan dengan penelitian yang peneliti kaji. Baik penelitian oleh Sayekti maupun penelitian yang peneliti kaji membahas mengenai kelompok relawan yang mendukung salah satu kandidat dalam sebuah pemilihan umum. Persamaan lainnya adalah kedua penelitian menggunakan teori Gerakan Sosial Baru. Selain itu keduanya menggunakan metode kualitatif deskriptif. Kedua penelitian juga sama-sama membahas mengenai proses terbentuknya kelompok relawan. Perbedaan dalam kedua penelitian adalah penelitian ini memilih relawan Jokowi pada Pilpres 2014 sebagai objek penelitiannya. Penelitian yang peneliti kaji memilih Teman Ahok sebagai objek penelitian. Dalam penelitian oleh Sayekti membahas proses terbentuknya kelompok relawan menggunakan teori Gerakan sosial Baru dengan perspektif kritis. Berbeda dengan penelitian yang peneliti kaji, yang membahas mengenai proses terbentuknya kelompok relawan dengan melihat tahapan-tahapan yang dilalui kelompok relawan tersebut melalui perspektif konsep gerakan sosial baru.

Penelitian terdahulu ketiga, adalah jurnal yang dibuat oleh Bambang Arianto dengan judul Fenomena Relawan Politik dalam Kontestasi Presidensial 2014. Dalam jurnal oleh Bambang membahas mengenai bagaimana kontestasi presidensial 2014 yang diwarnai oleh kehadiran relawan politik sebagai manifestasi dari meningkatnya partisipasi aktif warga masyarakat dalam demokrasi substansial. Jurnal ini juga menggunakan teori gerakan sosial dalam kajian. Hasil dari penelitian oleh Bambang adalah jika penguatan relawan politik dalam bentuk forum partisipatoris non formal menjadi alternatif terbaik dalam upaya menjaga warmth pemerintahan Jokowi yang populis. Posisi relawan dapat menjadi bagian dari gerakan kewarganegaraan yang kritis, rasional sekaligus suplemen demokrasi guna memperluas keterlibatan warga. Keterkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah persamaan fenomena yaitu kelompok relawan dan sebuah pemilihan umum. Selain itu, sama-sama menggunakan teori voluntarisme dan gerakan sosial baru. Perbedaan dari kedua penelitian adalah penelitian Bambang Arianto meneliti relawan Jokowi pada Pilpres 2014, sedangkan penelitian ini fokus pada Teman Ahok pada Pilgub 2017. Perbedaan masalah yang diangkat, jika penelitian Bambang Arianto lebih membahas mengenai kelompok relawan dapat berkontribusi terhadap pembangunan model demokrasi ekstra parlementer, penelitian ini membahas tentang proses terbentuknya kelompok relawan dalam pilkada.

Oleh karena itu, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya adalah peneliti mengangkat fenomena kelompok relawan dalam pemilihan kepada daerah menggunakan teori Gerakan Sosial Baru yang fokus

membahas proses terbentuknya kelompok relawan, dengan sudut pandang konsep volunteerisme untuk melihat motif dalam awal kemunculan Teman Ahok dan peran relawan dalam kegiatan keorganisasian Teman Ahok. Hal tersebut karena dalam penelitian ini menganalisis gerakan sosial yang tidak lahir dari suatu ketidakpuasan seperti yang di bahas di dalam penelitian-penelitian terdahulu, melainkan gerakan sosial yang lahir dari kesukarelaan untuk mendukung seorang yang dianggap mampu membuat perubahan, sehingga fenomena ini dianggap menarik dan relatif baru untuk diteliti.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan masalah penelitiannya ini sebagai berikut: bagaimana proses terbentuknya Gerakan Sosial Baru yang bernama Teman Ahok?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis tahapan-tahapan dalam proses terbentuknya Teman Ahok.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1.3.2.1 Aspek Teoritis

- (1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan contoh analisis baru yaitu studi kasus mengenai Gerakan Sosial Baru dalam politik dengan

terbentuknya sebuah kelompok relawan untuk mendukung kandidat tertentu pada pemilihan umum.

- (2) Penelitian ini diharapkan mampu menambah pemahaman mengenai bagaimana terbentuknya suatu kelompok relawan dapat mendukung aspirasi politik tertentu.
- (3) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pelajaran dan menganalisis terbentuknya kelompok relawan menggunakan tahapan-tahapan dalam gerakan sosial.
- (4) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan dan menganalisis motif relawan dalam proses terbentuknya kelompok relawan.

1.3.2.2 Aspek Praktis

- (1) Dapat memperkaya rujukan mengenai fenomena kelompok relawan politik dalam pemilihan umum.
- (2) Menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman penulis mengenai bagaimana terbentuknya kelompok relawan dalam pemilihan kepala daerah.
- (3) Memberikan analisis mendalam mengenai proses terbentuknya suatu kelompok relawan dalam sebuah pemilihan umum berdasarkan tahapan-tahapan dalam konteks gerakan sosial.

- (4) Menambah wawasan untuk menganalisis strategi yang bisa digunakan untuk membuat suatu gerakan sosial sehingga memungkinkan keberhasilan kedepannya.